



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo

Factors Influencing Budget Absorption Gorontalo Province's Center for Teachers

Risnawati Naue^{1*}, Saparudin², Novaliastuti Masiaga³

^{1,2,3}Program Studi Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Gorontalo

*Corresponding Author: E-mail: rinanaue83@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 7 Jun, 2025

Revised: 19 Aug, 2025

Accepted: 10 Sep, 2025

Kata Kunci:

Penyerapan, Anggaran, Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo

Keywords:

Absorption, Budget, Gorontalo Province Teacher Leaders Center

DOI: [10.56338/jks.v8i9.8595](https://doi.org/10.56338/jks.v8i9.8595)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh masing-masing faktor ini terhadap tingkat penyerapan anggaran BGP Provinsi Gorontalo. Penelitian ini dilakukan di BGP Provinsi Gorontalo, dengan fokus pada instansi Vertikal yang terkait dengan pengelolaan anggaran dan belanja. Perencanaan Anggaran terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan ketepatan dalam proses perencanaan sangat menentukan sejauh mana anggaran dapat terserap secara optimal. Semakin baik perencanaan yang dilakukan sejak awal, maka pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran akan lebih terarah, efisien, dan tepat sasaran. Sistem Pengelolaan Keuangan Meskipun hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengelolaan Keuangan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penyerapan Anggaran, namun secara simultan tetap memberikan kontribusi dalam mendukung efektivitas pelaksanaan anggaran. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan sistem yang baik saja tidak cukup, melainkan perlu disertai dengan implementasi yang konsisten dan terintegrasi. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesimpulan: Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi, pengalaman, dan kapasitas kerja aparatur sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. SDM yang kompeten akan mampu menerjemahkan perencanaan ke dalam aksi nyata secara efektif dan akuntabel.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the influence of each of these factors on the budget absorption rate of the Gorontalo Province BGP. This study was conducted in the Gorontalo Province BGP, focusing on vertical agencies related to budget management and expenditure. Budget Planning is proven to have a positive and significant influence on Budget Absorption. This indicates that the quality and accuracy of the planning process greatly determine the extent to which the budget can be absorbed optimally. The better the planning carried out from the beginning, the more focused, efficient, and on-target the implementation of activities and budget use will be. Financial Management System Although the results of statistical tests indicate that the Financial Management System variable does not have a partial significant effect on Budget Absorption, it simultaneously still contributes to supporting the effectiveness of budget implementation. This finding indicates that the existence of a good system alone is not enough, but needs to be accompanied by consistent and integrated implementation. Human Resources (HR) Conclusion: Human Resources have a positive and significant influence on Budget Absorption. This indicates that the competence, experience, and work capacity of the apparatus greatly influence the success of program implementation and budget use. Competent HR will be able to translate planning into concrete actions effectively and accountably.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 14 Tahun 2022, berubah nomenklaturnya menjadi Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Gorontalo. BGP adalah unit pelaksana teknis Kemendikbudristek di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. BGP Provinsi Gorontalo merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbudristek yang lahir dari kebijakan

Sekolah Penggerak, salah satu di dalamnya adalah peningkatan kapasitas dan kinerja guru di Provinsi Gorontalo melalui berbagai kegiatan pelatihan.

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab BGP Provinsi Gorontalo. Dengan perjanjian kinerja tersebut Kemendikbudristek akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target. Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Perencanaan anggaran yang kurang matang dalam menyusun anggaran berdasarkan program yang akan dilaksanakan, dan juga prosedur birokrasi yang kompleks sering kali menjadi penyebab rendahnya penyerapan anggaran. Selain itu, rendahnya penyerapan anggaran dapat berdampak pada lambatnya kegiatan dalam mendukung program-program yang telah direncanakan.

Simkowitz dan Beasley (2019) menyatakan bahwa anggaran adalah pernyataan rencana keuangan untuk periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, mampu merealisasikan anggaran dan target dalam satu periode.

Dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), setiap satker menunggu keputusan tentang besarnya DIPA yang akan diterima oleh setiap UPT Kemendikbudristek, untuk dijadikan dasar menentukan kebijakan dalam dukungan manajemen satker dan penyusunan program-program kegiatan yang dituangkan dalam DIPA satker sangat besar jumlahnya, sehingga terlambat dalam pelaksanaan program kegiatan. Oleh karena itu faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran dan belanja sangat diperlukan.

Sistem Pengelolaan Keuangan merupakan suatu rangkaian proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pencatatan, laporan keuangan serta evaluasi dan bertujuan menetransmisikan transparansi dalam pengelolaan keuangan, meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, dan memberikan data yang akurat untuk pengambilan keputusan dapat juga mengontrol pengeluaran agar sesuai anggaran serta meningkatkan akuntabilitas. Dengan adanya kemajuan teknologi merupakan bagian dari globalisasi yang membawa tuntutan dan perubahan ke arah yang lebih baik dari masyarakat terhadap pemerintah. Pelayanan publik yang mudah dan cepat merupakan salah satu cara mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (Kemenkeu, 2021).

Dengan memanfaatkan sistem teknologi, diharapkan seluruh pelayanan pemerintah lebih efisien, terkait dengan hal tersebut BGP Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan keuangan sudah menggunakan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) yang merupakan transformasi digital merubah alur dan tata cara bekerja sehingga memanfaatkan sistem teknologi, diharapkan seluruh pelayanan pemerintah lebih efisien dan transparansi.

Mulyadi (2015) Sistem pengelolaan keuangan adalah memastikan serangkaian prosedur dan metode yang dirancang untuk mengatur perencanaan, pencatatan, pengendalian, dan pelaporan keuangan guna tercapainya tujuan organisasi. (Mardiasmo, 2009) Sistem Pengelolaan Keuangan adalah suatu mekanisme atau serangkaian proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pengawasan, dan pelaporan keuangan organisasi, yang dirancang untuk memastikan pengelolaan sumber daya keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sumber daya manusia pengaruhnya juga sangat dibutuhkan yang memiliki keahlian dalam mengelola keuangan, dan juga SDM bukan hanya pekerja di suatu organisasi, tetapi juga mencakup potensi, motivasi, dan nilai-nilai yang mereka bawa, yang dapat mempengaruhi keberhasilan jangka panjang serta memberikan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan SDM sesuai tupoksi dan jabatannya. Menurut Hasibuan, (2016) Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu yang bekerja dalam suatu organisasi yang memiliki kemampuan, potensi, dan keahlian yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam konteks etos kerja, SDM mencakup perilaku, sikap, dan nilai-nilai kerja yang mencerminkan komitmen, tanggung jawab, dan dedikasi terhadap pekerjaan yang dilakukan (Mangkunegara, 2015). BGP Provinsi Gorontalo adalah satu dari beberapa UPT Kemedikbudristek yang ada di Provinsi Gorontalo dimana fenomenanya adalah memiliki sumber daya yang tersedia,

namun masih perlu meningkatkan kompetensi yang dimiliki dalam mengelola keuangan, perencanaan anggaran dan juga pengawasan yang sangat berpengaruh terhadap realisasi dan target anggaran.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan di instansi pemerintah, BGP sebagai lembaga yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan anggaran yang telah dialokasikan dapat digunakan secara optimal untuk mendukung program-program strategis. Di Provinsi Gorontalo, terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi dalam penyerapan anggaran BGP Provinsi Gorontalo

Salah satu tolak ukur yang menjadi indikator penting untuk mengetahui kinerja BGP Provinsi Gorontalo adalah dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan. Lambatnya penyerapan anggaran menjadi salah satu masalah klasik, yang terus terjadi setiap tahun. Penyerapan anggaran di awal tahun (triwulan pertama) begitu kecil, tetapi mengalami peningkatan yang signifikan di akhir tahun (triwulan keempat) (Malahayati dkk, 2015). Seharusnya, pada pertengahan tahun tingkat penyerapan anggaran diharapkan sudah mencapai 50% dan dapat meningkat 100% pada akhir tahun.

Penyerapan anggaran negara memerlukan adanya perimbangan dan proporsi pergerakan yang berjalan kontinyu (Suheri, 2019). Permasalahan mengenai penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan dialami oleh banyak instansi atau lembaga pemerintahan, tidak hanya di tingkat pusat namun juga di daerah (Rasyid, 2017). Kondisi tersebut juga dialami oleh BGP Provinsi Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di BGP Provinsi Gorontalo, dengan fokus pada instansi Vertikal yang terkait dengan pengelolaan anggaran dan belanja. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi sederhana untuk mengelolah dan membahas data yang telah diperoleh dan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Teknik analisis regresi dipilih dalam penelitian ini karena teknik analisis regresi sederhana dapat menyimpulkan secara langsung mengenai satu variabel dependen (Y) dan tiga variabel independen (X).

HASIL DAN DISKUSI

Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo. Hal ini memperlihatkan bahwa ketika perencanaan anggaran dilakukan secara baik melalui proses yang partisipatif, berbasis kebutuhan riil, dan mempertimbangkan kapasitas pelaksanaan, maka alokasi anggaran yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara optimal. Dalam praktiknya, perencanaan anggaran yang berkualitas akan memberikan arah dan kepastian dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan tahapan waktu, kesiapan sumber daya, serta skala prioritas pembangunan, akan meminimalkan keterlambatan eksekusi, pergeseran anggaran yang tidak perlu, serta hambatan administratif yang sering menjadi kendala dalam proses penyerapan anggaran. Dengan demikian, perencanaan bukan sekadar proses administratif, tetapi menjadi instrumen strategis dalam menjamin efektivitas belanja daerah.

Secara teoritis, hasil ini mendukung pandangan Mardiasmo (2009), yang menyatakan bahwa siklus penganggaran dimulai dari perencanaan yang matang, karena di tahap inilah arah kebijakan fiskal dan pembangunan ditentukan. Perencanaan yang buruk cenderung menghasilkan alokasi yang tidak tepat sasaran, serta mengakibatkan ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan, yang akhirnya berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran.

Penelitian ini juga sejalan dengan hasil studi empiris yang dilakukan (Sartika & Roza, 2024) menemukan bahwa perencanaan anggaran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, demikian juga (Sutono et al., 2022), olehnya daerah-daerah dengan mekanisme

perencanaan anggaran yang sistematis dan transparan cenderung memiliki kinerja penyerapan anggaran yang lebih baik.

Dalam konteks ini, keakuratan data perencanaan, keterlibatan lintas sektor dalam proses penyusunan anggaran, serta konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi faktor penting yang mendorong keberhasilan pelaksanaan anggaran. Dengan kata lain, perencanaan anggaran yang efektif tidak hanya memberikan kerangka kerja bagi penggunaan sumber daya publik, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas fiskal dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Oleh karena itu, memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menyusun perencanaan anggaran yang berkualitas menjadi langkah strategis dalam meningkatkan penyerapan anggaran di lingkungan BGP Provinsi Gorontalo.

Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan terhadap Penyerapan Anggaran Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo

Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran secara statistik, hal ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa sistem tersebut tidak penting dalam proses pengelolaan keuangan BGP Provinsi Gorontalo. Temuan ini justru dapat merefleksikan adanya potensi ketidaksesuaian antara desain sistem yang ada dengan implementasi di lapangan, atau lemahnya pemanfaatan sistem tersebut oleh aparat BGP Gorontalo.

Secara konseptual, sistem pengelolaan keuangan yang baik mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan. Sistem ini idealnya bersifat terintegrasi dan mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam penggunaan anggaran publik. Namun, dalam praktiknya, sistem yang sudah dibangun sering kali belum diimbangi dengan kapasitas sumber daya yang memadai, baik dari sisi pemahaman teknis pengguna, kepatuhan terhadap prosedur, maupun konsistensi dalam pelaksanaan.

Teori sistem pengendalian manajemen menekankan pentingnya keterpaduan antarproses dan kejelasan alur informasi dalam mendukung pengambilan keputusan fiskal. Dalam konteks ini, lemahnya pengaruh sistem pengelolaan keuangan terhadap penyerapan anggaran dapat menjadi indikasi bahwa sistem belum sepenuhnya dioptimalkan untuk menunjang eksekusi anggaran secara tepat waktu dan tepat sasaran. Hal ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kendala teknis, tumpang tindih regulasi, dan kurangnya interoperabilitas antar aplikasi keuangan sering menjadi hambatan utama dalam pemanfaatan sistem keuangan daerah. Dengan demikian, meskipun secara statistik tidak signifikan, secara substantif sistem pengelolaan keuangan tetap memainkan peran penting dalam mendukung efisiensi penyerapan anggaran. Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap desain dan penerapan sistem tersebut agar lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan pelaksanaan anggaran di daerah.

Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo

Temuan lainnya menunjukkan bahwa sumber daya manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hasil ini menunjukkan bahwa kompetensi, kapasitas, serta profesionalisme aparatur pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam keberhasilan realisasi anggaran. Dalam kerangka teori sumber daya (*resource-based view*), kemampuan organisasi untuk menghasilkan kinerja yang unggul sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya yang dimilikinya, termasuk dalam hal ini adalah kualitas SDM. Sumber daya manusia yang memahami regulasi keuangan, memiliki keterampilan teknis, serta mampu mengelola program dan kegiatan secara efektif, akan lebih mampu mengeksekusi anggaran sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan.

Dukungan empiris terhadap temuan ini juga ditemukan dalam berbagai penelitian terdahulu, antara lain, (Pradila et al., 2024), (Sutono et al., 2022), menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan regulasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja. Sedangkan pengawasan intern tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja. Dari temuan ini dapat menyimpulkan bahwa rendahnya penyerapan anggaran daerah sering kali berakar pada lemahnya kapasitas perencanaan dan pelaksanaan program oleh aparat, minimnya pelatihan dan pengembangan SDM, serta rendahnya motivasi dan kepemimpinan teknis di unit pelaksana. Namun temuan ini tidak sejalan dengan (Sartika & Roza, 2024) menemukan bahwa

sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Oleh karena itu, meningkatkan kualitas SDM bukan hanya soal peningkatan jumlah pegawai atau pelatihan formal, tetapi mencakup pembentukan kultur kerja yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Pemerintah daerah perlu menempatkan pengembangan kapasitas aparatur sebagai investasi strategis dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran serta mendukung tata kelola keuangan daerah yang efektif dan akuntabel.

Pengaruh Perencanaan Anggaran, Sistem Pengelolaan Keuangan dan Sumberdaya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo

Berdasarkan hasil analisis regresi yang menunjukkan bahwa variabel perencanaan anggaran, sistem pengelolaan keuangan, dan sumber daya manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran di Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa ketiga faktor tersebut memiliki peran krusial dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan pendekatan resource-based view (RBV) yang menekankan bahwa keunggulan organisasi dalam mencapai kinerja optimal sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya internalnya, termasuk perencanaan yang matang, sistem pengelolaan yang efektif, dan kompetensi sumber daya manusia yang memadai.

Penelitian oleh Dewi Sartika dan Sapna Julita Roza (2024) di Kabupaten Aceh Jaya menemukan bahwa perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran, meskipun secara parsial hanya perencanaan anggaran yang berpengaruh signifikan. ojs.polmed.ac.id Selanjutnya, studi oleh (Sari et al., 2023) di Pemerintah Kota Palembang menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran, dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,793.

Dalam konteks Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo, hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas perencanaan anggaran, sistem pengelolaan keuangan yang efektif, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia secara bersamaan dapat meningkatkan penyerapan anggaran secara signifikan. Oleh karena itu, strategi peningkatan kapasitas kelembagaan dan individu melalui pelatihan, penguatan sistem informasi keuangan, serta perencanaan yang partisipatif dan berbasis data menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran.

Temuan ini juga mendukung pentingnya integrasi antara aspek teknis dan sumber daya manusia dalam pengelolaan anggaran, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian oleh Nursela et al. (2022) yang menekankan bahwa perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, pelaksanaan anggaran, dan komitmen organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Dengan demikian, untuk meningkatkan penyerapan anggaran di Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup perbaikan dalam perencanaan anggaran, penguatan sistem pengelolaan keuangan, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia secara simultan.

KESIMPULAN

Perencanaan Anggaran terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan ketepatan dalam proses perencanaan sangat menentukan sejauh mana anggaran dapat terserap secara optimal. Semakin baik perencanaan yang dilakukan sejak awal, maka pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran akan lebih terarah, efisien, dan tepat sasaran.

Sistem Pengelolaan Keuangan Meskipun hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengelolaan Keuangan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penyerapan Anggaran, namun secara simultan tetap memberikan kontribusi dalam mendukung efektivitas pelaksanaan anggaran. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan sistem yang baik saja tidak cukup, melainkan perlu disertai dengan implementasi yang konsisten dan terintegrasi.

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesimpulan: Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi, pengalaman,

dan kapasitas kerja aparatur sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. SDM yang kompeten akan mampu menerjemahkan perencanaan ke dalam aksi nyata secara efektif dan akuntabel.

SARAN

Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo disarankan untuk memperkuat proses perencanaan anggaran dengan mengedepankan pendekatan partisipatif, berbasis data, serta mempertimbangkan evaluasi dari pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan teknis perencanaan kepada tim perencana agar kualitas dokumen perencanaan semakin akurat dan responsif terhadap kebutuhan strategis organisasi.

Perlu dilakukan penguatan terhadap implementasi sistem pengelolaan keuangan dengan meningkatkan kapasitas pengguna, menyederhanakan prosedur birokrasi, serta memastikan kesesuaian sistem dengan kebutuhan operasional di lapangan. Pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi keuangan berbasis digital juga perlu ditingkatkan untuk mendorong efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Pemerintah melalui Balai Guru Penggerak perlu terus berinvestasi dalam pengembangan SDM, baik melalui pelatihan teknis, penguatan etos kerja, maupun peningkatan motivasi dan kepemimpinan. Evaluasi kinerja individu juga penting untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan lebih lanjut dan memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kontribusi nyata dalam pencapaian target anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2006). . Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta:Penerbit Erlangga.
- Bastian, I. (2009). Akuntansi Sektor Publik (Pertama). BPFE-Yogyakarta.
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate SPSS 20. intro (PDFDrive).pdf (p. 447). Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Ed. 9 (9th ed.). Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro., 2018.
https://digilib.usm.ac.id/fek/index.php?p=show_detail&id=2134
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah (Ed 4). Salemba empat : Jakarta , 2012.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2013). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik (1st ed.). Salemba Empat.
- Hasibuan, M. S. . (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. In Bumi Aksara (Edisi Revi). PT Bumi Aksara.
<https://www.google.com/search?udm=36&q=Hasibuan%2C+Malayu+S.P.+2016.+Manajemen+Sumber+Daya+Manusia.+Edisi+Revisi.+Jakarta%3A+Penerbit+PT+Bumi+Aksara.>
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Andi, Yogyakarta , 2009.
- Mardiasmo. (2018). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Andi Yogyakarta.
https://books.google.co.id/books/about/Otonomi_Manajemen_Kuangan_Daerah.html?id=6_BBEEAAQBAJ&redir_esc=y
- Mulyadi. (2014). Sistem Akuntansi. Cetakan Keempat. Jakarta : Salemba Empat.
<https://www.google.com/search?udm=36&q=Mulyadi.+2014.+Sistem+Akuntansi.+Cetakan+Keempat.+Jakarta+%3A+Salemba+Empat.>
- Mulyadi. (2015). Bantu Pengendalian Manajemen Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Tirta. Akuntansi Manajemen Konsep, Manfaat Dan Rekayasa. Edisi Kelima, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Nawawi, H. (2003). Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif, Cetakan ke-7, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
<https://www.google.com/search?udm=36&q=H.+Hadari+Nawawi%2C+2003%3B+Manajemen+Sumber+Daya+Manusia+Untuk+Bisnis+Yang+Kompetitif%2C+Cetakan+ke-7%2C+Gadjah+Mada+University+Press%2C+Yogyakarta.+>
- Nursela, N., Taufik, T., & Yasni, H. (2022). Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pelaksanaan Anggaran Dan Komitmen Organisasi Pada Penyerapan Anggaran. CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini, 3(1), 11–23.

- <https://doi.org/10.31258/current.3.1.11-23>
- Pradila, Y., Astuty, W., & Hanum, Z. (2024). Pengaruh Perencanaan Anggaran , Pelaksanaan Anggaran Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi. 4(1), 2289–2320.
- Sari, N. D., Maria, M., & Indriasari, D. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 1896–1915. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.4518>
- Sartika, D., & Roza, sapna julita. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Provinsi Di Pulau Sumatera. *JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 7(1), 46. <https://doi.org/10.32502/jab.v9i1.8419>
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian. *Metode Penelitian*, 32–41.
- Sutono, D. P. S., Respati, N. W., & Safrida, L. (2022). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja Satker Pusat Di Daerah Lingkup Kemenlhk. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 12(1), 135–144. <https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3656>